

RANHIR RENSTRA TA 2025-2029



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



dinaslingkunganhiduptanjabbar

dinaslingkunganhiduptjb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Ranhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Ranhir Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang mendukung terwujudnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pengelolaan lingkungan di tingkat lokal, serta melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman kerja yang operasional, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara efektif.

Kuala Tungkal, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	3
Daftar Gambar.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Maksud dan Tujuan	7
a. Maksud	7
b. Tujuan	8
D. Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	17
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	29
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
b. Isu Strategis.....	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
A. Tujuan Renstra DLH Kabupaten Tanjabbar Tahun 2025-2029.....	33
B. Sasaran Renstra DLH Kabupaten Tanjabbar Tahun 2025-2029.....	33
C. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	37
D. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
BAB V PENUTUP	74

Daftar Tabel

Tabel 1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup	12
Tabel 2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup	15
Tabel 3 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	20
Tabel 4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang.....	21
Tabel 5 Jumlah Aset.....	22
Tabel 6 SPM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat	27
Tabel 7 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
Tabel 8 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD.....	35
Tabel 9 Penahapan Renstra PD	38
Tabel 10 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029.....	42
Tabel 11 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029	51
Tabel 12 Sub Kegiatan Prioritas	67
Tabel 13 Target Indikator Kinerja Utama	70
Tabel 14 Target Indikator Kinerja Kunci	72

Daftar Gambar

Bagan 1 Capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat	14
Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat	19
Bagan 3 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dua dekade terakhir, dunia menghadapi tekanan lingkungan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak berkelanjutan. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas industri dan energi berbasis fosil telah memicu krisis iklim yang ditandai oleh meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan air laut, hingga gangguan terhadap keanekaragaman hayati.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia merespons dengan mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dalam RPJPN 2025–2045 yang menekankan pentingnya transformasi menuju pembangunan hijau (*green development*), penguatan ketahanan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Arah ini akan diperkuat lebih lanjut melalui RPJMN 2025–2029 yang sedang dalam proses penetapan dan akan menjadi rujukan kebijakan lima tahunan ke depan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti kawasan hutan, gambut, pesisir, dan ekosistem sungai, yang berperan penting dalam mendukung keseimbangan lingkungan dan penghidupan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya, pembangunan yang belum sepenuhnya berwawasan lingkungan telah memberikan tekanan terhadap kualitas dan fungsi ekologis wilayah ini.

Salah satu tantangan besar yang kini dihadapi adalah meningkatnya dampak perubahan iklim global yang turut dirasakan di tingkat lokal. Fenomena seperti banjir, kekeringan, abrasi, dan perubahan pola cuaca menjadi lebih sering terjadi dan berdampak terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, degradasi kualitas lingkungan hidup masih terjadi, yang terlihat dari pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara di kawasan padat aktivitas, serta tekanan terhadap fungsi lahan akibat konversi dan alih guna yang tidak terkendali.

Pengelolaan sampah juga menjadi persoalan krusial, di mana sebagian besar wilayah belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan partisipatif. Keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan aturan, dan rendahnya pemilahan dari sumber menyebabkan volume sampah meningkat dan mencemari lingkungan sekitar. Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih perlu ditingkatkan. Partisipasi publik

dalam pelestarian lingkungan, meskipun mulai tumbuh, belum menjadi gerakan bersama yang kuat dan berkelanjutan.

Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan strategis yang responsif terhadap tantangan lingkungan daerah. Diperlukan arah kebijakan dan langkah-langkah nyata yang mampu memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta membangun budaya sadar lingkungan di tengah masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk itu, dibutuhkan dokumen perencanaan strategis yang mampu mengarahkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DLH dalam jangka menengah secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahannya.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

11. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 (Perubahan Ke-3).
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai upaya sistematis untuk merumuskan arah pembangunan sektor lingkungan hidup di daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan dokumen

perencanaan strategis yang menjabarkan mandat teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga berfungsi sebagai alat kendali strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada publik. Di tengah meningkatnya tantangan dan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup, seperti degradasi kualitas air dan udara, persoalan pengelolaan sampah, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka penyusunan dokumen Renstra menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa seluruh intervensi pembangunan lingkungan hidup dilakukan secara efektif, efisien, adaptif, dan berbasis data serta kebutuhan nyata masyarakat.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. **Menyediakan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup** dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan daerah;
2. **Menyelaraskan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah** di bidang lingkungan hidup dengan visi dan misi Kepala Daerah, serta dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jambi, sehingga tercipta konsistensi dan keterpaduan antar level pemerintahan;
3. **Mengidentifikasi isu strategis lingkungan hidup daerah secara komprehensif** sebagai dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang tepat sasaran serta berorientasi pada hasil (*outcome-based*);
4. **Mewujudkan perencanaan berbasis kinerja dan bukti (*evidence-based planning*)** yang memungkinkan pengukuran capaian pembangunan secara objektif dan akuntabel, melalui indikator kinerja yang terukur, realistis, dan relevan;
5. **Menjadi acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup**, dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta dalam penyusunan rencana penganggaran berbasis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah;

6. **Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya**, baik anggaran, SDM, maupun sarana-prasarana, agar dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan dampak nyata terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
7. **Menjamin terbangunnya mekanisme evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan** secara periodik, sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja perangkat daerah.

D. Sistematika Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029

Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN

Bab I memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (LKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jambi yang terletak di bagian timur pesisir Pulau Sumatera. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang unik, terdiri dari kawasan pesisir, lahan gambut, sungai, rawa, serta daratan yang menopang sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, Tanjung Jabung Barat memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Namun demikian, di tengah laju pembangunan dan pertumbuhan penduduk, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu mendasar adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, pembakaran lahan, dan penggunaan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang menjadi penyebab utama berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, penurunan kualitas tanah, serta gangguan terhadap ekosistem lokal.

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2025, dilakukan penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU menggambarkan kinerja utama perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sedangkan IKK merepresentasikan indikator teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengidentifikasi keberhasilan, kendala, dan ruang perbaikan. Hasilnya menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan, dan penajaman sasaran dalam Renstra periode 2025–2029. Tabel berikut menyajikan capaian IKU dan IKK selama tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Formulasi	Target					Realisasi					Ket
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Pengelolaan Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IKA + IKU + IKTL}{3}$	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	50,18	69,61	72,69	77,36	-	Uji Sampling dan Data Dari Pusat
2	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Persentase Usaha/Kegiatan Dari Persampahan Dan Kehati Serta Penataan Dan Pnaatan Bidang Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup = $\frac{JUK \text{ (Jumlah Usaha Kegiatan)}}{JIL \text{ (Jumlah Izin Lingkungan)}} \times 100\%$	85%	90%	95%	100%	100%	85%	90%	95%	100%	-	Dunia Usaha

Kuala Tungkal, September 2025
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 19680116 199703 1 002



Dinas Lingkungan Hidup menetapkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam periode Renstra 2021–2025, yaitu (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan (2) Persentase Usaha/Kegiatan dari Persampahan, Kehati serta Penataan dan Petaan Bidang Lingkungan Hidup. Evaluasi capaian kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH merupakan indikator agregat yang mengukur kualitas udara, air, dan tutupan lahan. Target IKLH pada periode 2021–2025 ditetapkan meningkat secara bertahap dari 68,50 pada tahun 2021 hingga 68,90 pada tahun 2025. Realisasi menunjukkan perkembangan sebagai berikut: tahun 2021 (50,18), tahun 2022 (69,61), tahun 2023 (72,69), dan tahun 2024 (77,36).

Capaian awal tahun 2021 masih jauh di bawah target, dipengaruhi keterbatasan data baseline serta dampak pandemi. Namun sejak 2022 hingga 2024, IKLH menunjukkan tren peningkatan signifikan dan secara konsisten melampaui target tahunan. Hal ini mencerminkan keberhasilan program pengendalian pencemaran, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan persampahan. Keberhasilan ini juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

Kendati demikian, tantangan masih ada, terutama potensi peningkatan beban pencemaran akibat pertumbuhan aktivitas industri dan transportasi, serta ancaman alih fungsi lahan. Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada penguatan pemantauan kualitas lingkungan berbasis teknologi, penegakan regulasi lingkungan yang konsisten, serta pengembangan program adaptasi perubahan iklim.

2. Persentase Usaha/Kegiatan dari Persampahan, Kehati serta Penataan dan Petaan Bidang Lingkungan Hidup

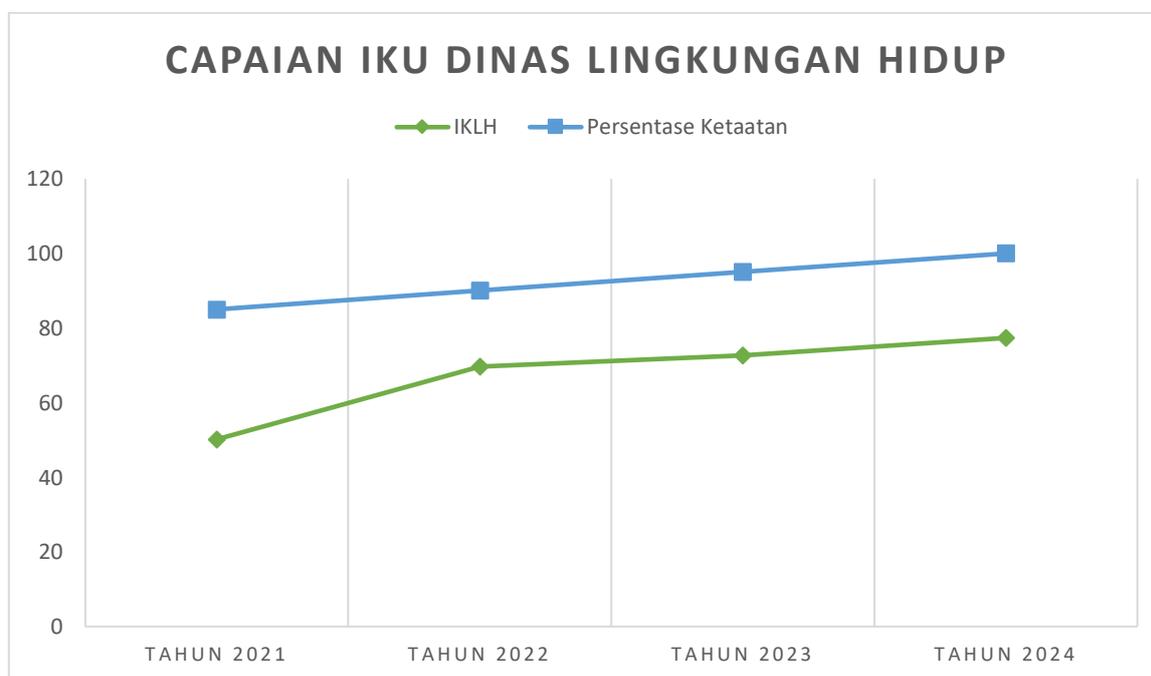
Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan usaha/kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan, termasuk bidang persampahan, keanekaragaman hayati, serta penataan dan petaan. Target indikator ditetapkan meningkat dari 85% pada tahun 2021 hingga 100% pada tahun 2025. Realisasi capaian menunjukkan konsistensi dengan target: 85% (2021), 90% (2022), 95% (2023), dan 100% (2024).

Capaian yang selalu sesuai dengan target bahkan telah menyentuh angka maksimal pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan upaya pengawasan, pembinaan, dan penerapan regulasi lingkungan. Hal ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran dan komitmen pelaku usaha/kegiatan dalam melaksanakan kewajiban lingkungan hidup.

Tindak lanjut ke depan difokuskan pada menjaga konsistensi kepatuhan, peningkatan kualitas ketaatan (bukan hanya kuantitas), serta penguatan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, DLH perlu terus mendorong transparansi informasi lingkungan dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian IKU DLH tahun 2021–2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik. IKLH melampaui target secara signifikan, sementara indikator kepatuhan usaha/kegiatan telah mencapai target maksimal. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa program pengendalian pencemaran, pengelolaan persampahan, penataan lingkungan, dan pembinaan kepatuhan usaha telah berjalan efektif. Ke depan, fokus diarahkan pada konsistensi, peningkatan kualitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.



Bagan 1 Capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target					Realisasi					Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Hasil pengukuran indeks kualitas air	≥ 60 (sedang)	66,50	64,50	65,00	65,50	66,00	66,50	0,00	50,00	60,00	70,00	-	0%	77%	92%	106%	
2	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	≥ 70 (baik)	94,80	94,00	94,20	94,40	94,60	94,80	94,37	94,46	94,47	95,75	-	100%	100%	100%	101%	
3	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	≥ 70	57,00	55,00	55,50	56,00	56,50	57,00	54,61	57,32	54,18	55,98	-	99%	103%	97%	99%	
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air laut	≥ 70	78,80	76,50	77,10	77,80	78,40	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0%	0%	0%	0%	
5	Hasil pengukuran indeks kualitas ekosistem gambut	≥ 60	75,20	73,30	73,80	74,40	74,80	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0%	0%	0%	0%	
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	≥ 70	71,19	69,55	69,96	70,37	70,78	71,19	50,18	69,61	72,69	77,36	-	72%	99%	103%	109%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target					Realisasi					Capaian				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	≥ 100% (Permen LHK P.16/2021, P.75/2019 — target nasional 100% pengelolaan 2025)	89%	80%	83%	85%	87%	89%	74%	75%	84%	80%	-	93%	90%	99%	92%	
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (yang diawasi)	≥ 100% (pengawasan berkala sesuai PP 22/2021 dan Permen LHK P.26/2021)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	

Kuala Tungkal, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002



Konsekuensi dari rendahnya kesadaran lingkungan ini tidak hanya berdampak pada rusaknya kualitas lingkungan fisik, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, menurunkan daya dukung lahan untuk produksi, dan menimbulkan bencana ekologis seperti banjir serta kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui edukasi, pelibatan komunitas, serta penegakan aturan secara konsisten.

Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memegang peranan penting sebagai institusi pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas ini bertugas merumuskan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pelestarian fungsi ekologis ruang terbuka hijau, dan pembinaan partisipasi masyarakat.

Melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen mendorong terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kesadaran masyarakat sebagai garda terdepan pelestarian lingkungan.

a Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

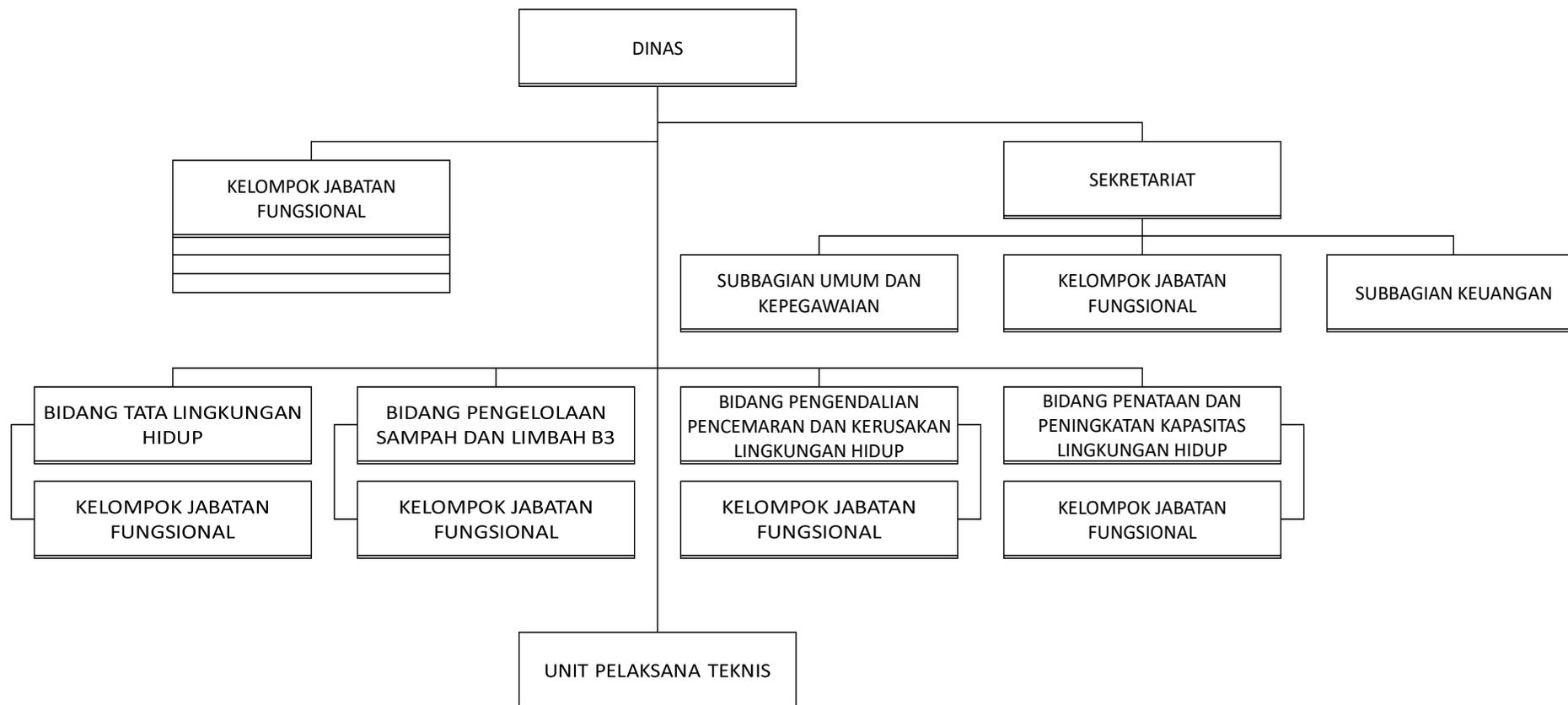
Tipologi

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Bidang Tata Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber: Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023

b Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. SDM yang dimiliki terdiri dari berbagai kategori, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga tenaga kontrak dan petugas teknis lapangan seperti petugas kebersihan dan pertamanan.

Keberagaman jenis tenaga kerja ini mencerminkan kompleksitas dan kebutuhan operasional yang luas dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Setiap kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun secara bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi SDM yang ada, berikut disajikan data jumlah tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kategori jabatan dan status kepegawaian:

Tabel 3 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Status Kepegawaian	Jenis Tugas	Jumlah
1	PNS	Semua tugas (struktural/fungsional)	20
2	PPPK	Umum dan teknis	6
3	Tenaga Kontrak (TKK)	Staf Administrasi	33
4	Tenaga Kontrak (TKK)	Petugas Kebersihan	228
5	Tenaga Kontrak (TKK)	Petugas Pertamanan	40
TOTAL			327

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjabbar Tahun 2025

Tabel 4 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Ruang

No	STATUS	Golongan Ruang	Jumlah PNS
1	PNS	I/a – I/d	-
2	PNS	II/a – II/d	-
3	PNS	III/a – III/d	15
4	PNS	IV/a – IV/e	5
TOTAL			20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjabbar Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa pegawai berstatus PNS dan PPPK di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

- Golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang,
- Golongan III sebanyak 15 (Limas Belas) orang, dan
- Pejabat Umum dan Teknis sebanyak 6 (Enam) orang

Sementara itu, jumlah pegawai non-ASN (Tenaga Kerja Kontrak/ TKK) meliputi:

- 33 (Tiga Puluh Tiga) orang yang bertugas sebagai staf administrasi, serta
- 268 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) orang petugas yang menangani kebersihan dan pertamanan.

Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana teknis operasional, terutama dalam bidang kebersihan dan pertamanan, berasal dari tenaga non-ASN. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan strategi penguatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai pada periode perencanaan mendatang.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Jumlah Aset

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Koefisien	Satuan	Kondisi	Keterangan
1	AC Split	1	Unit	-	
2	AC Split	6	Unit	Rusak Berat	
3	AC Split	7	Unit	Kurang Baik	
4	AC Split	7	Unit	Baik	
5	Alat Laboratorium	1	Buah	Kurang Baik	Bottle And Stoper
6	Alat Pengangkat Lainnya	1	Unit	Kurang Baik	
7	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	Unit	Baik	Gorden
8	Alat Tennis Meja	1	Unit	Baik	
9	Alat Uji Struktur Kimia Logam	1	Unit	-	
10	Alat Ukur Udara	1	Unit	Rusak Berat	
11	Amplifier	5	Unit	Baik	
12	Angkong	1	Unit	Baik	
13	Arco	3	Unit	Baik	
14	Backhoe Loader	1	Unit	Baik	
15	Box Arsip	14	Unit	Baik	
16	Kamera Digital	2	Unit	Rusak Berat	
17	Kamera Digital	1	Unit	Baik	
18	CCTV	1	Unit	Baik	
19	Chain Shaw	1	Unit	Baik	
20	Kontainer	5	Unit	Baik	
21	Kontainer	1	Unit	Kurang Baik	
22	Crawler Excavator	2	Unit	Baik	
23	Depo Pengepul Limbah Medis	1	Unit	Baik	
24	Dropbox	20	Unit	Baik	
25	Drone	1	Unit	Baik	
26	Dumptruk	7	Unit	Rusak Berat	
27	Dumptruk	7	Unit	Baik	
28	Excavator	1	Unit	Rusak Berat	
29	Faximile	1	Unit	Rusak Berat	
30	Filling Kabinet	3	Unit	Baik	
31	Filling Kabinet	1	Unit	Rusak Berat	
32	Filling Kabinet	3	Unit	Kurang Baik	
33	Garasi Kendaraan Operasional	1	Unit	Kurang Baik	
34	Garasi Mobil Sampah	1	Unit	Baik	
35	Genset	1	Unit	Kurang Baik	
36	Genset	1	Unit	Rusak Berat	
37	Gerobak Dorong	6	Unit	Baik	Besi

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Koefisien	Satuan	Kondisi	Keterangan
38	Handcam	3	Unit	Rusak Berat	
39	Ils Calibration Rx	1	Unit	Rusak Berat	Uji Logam
40	Instalasi Pengolahan Sampah	1	Unit	Baik	Hibah Kementrian
41	Instalasi Gardu Listrik	1	Unit	Baik	Eks Kantor Dtph
42	Jalan Khusus	4	Unit	Baik	Eks Tpa Ds. Tkl li
43	Kantor Dinas	1	Unit	Kurang Baik	
44	Kipas Angin	4	Unit	Rusak Berat	
45	Kipas Angin	2	Unit	Kurang Baik	
46	Kipas Angin	2	Unit	Baik	
47	Komputer	11	Unit	Rusak Berat	
48	Komputer	4	Unit	Kurang Baik	
49	Komputer	11	Unit	Baik	
50	Kotak Surat	50	Unit	Kurang Baik	Kayu
51	Krisbow	11	Unit	Baik	Tempat Sampah
52	Krisbow	50	Unit	Baik	Tempat Sampah Gantung
53	Krisbow	20	Unit	Baik	Tempat Sampah 120 L
54	Kursi Besi	2	Unit	Rusak Berat	
55	Kursi Biasa	2	Unit	-	Kayu
56	Kursi Biasa	5	Unit	Rusak Berat	Kayu
57	Kursi Kerja	2	Unit	Rusak Berat	Kayu
58	Kursi Kerja	15	Unit	Baik	Campuran
59	Kursi Lipat	2	Unit	Rusak Berat	
60	Kursi Putar	7	Unit	-	
61	Kursi Putar	14	Unit	Rusak Berat	Plastik
62	Kursi Putar	2	Unit	Baik	
63	Kursi Rapat	55	Unit	Baik	Campuran
64	Kursi Tamu	1	Unit	Rusak Berat	Campuran
65	Kursi Tamu	1	Unit	-	Kayu
66	Laptop	2	Unit	-	
67	Laptop	2	Unit	Rusak Berat	
68	Laptop	1	Unit	Kurang Baik	
69	Laptop	12	Unit	Baik	
70	LCD Proyektor	1	Unit	Baik	
71	Lemari	3	Unit	Rusak Berat	Besi
72	Lemari	2	Unit	Baik	Kayu
73	Lemari	1	Unit	Kurang Baik	Kayu
74	Lemari Besi	1	Unit	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Koefisien	Satuan	Kondisi	Keterangan
75	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit	Kurang Baik	
76	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5	Unit	Baik	Kayu
77	Lemari Es	1	Unit	Baik	
78	Lemari Kayu	3	Unit	Baik	
79	Loudspeaker	3	Unit	Baik	
80	Meja 1/2 Biro	7	Unit	Kurang Baik	Kayu, Campuran
81	Meja 1/2 Biro	14	Unit	Rusak Berat	Kayu, Campuran
82	Meja 1/2 Biro	2	Unit	Baik	
83	Meja 1/2 Biro	3	Unit	-	Kayu
84	Meja Kerja	5	Unit	Rusak Berat	Campuran
85	Meja Kerja	17	Unit	Kurang Baik	
86	Meja Kerja	6	Unit	Baik	
87	Meja Komputer	1	Unit	-	Campuran
88	Meja Komputer	3	Unit	Kurang Baik	Campuran
89	Meja Komputer	2	Unit	Rusak Berat	Kayu
90	Meja Rapat	2	Unit	Rusak Berat	Campuran
91	Meja Rapat	1	Unit	Baik	Campuran
92	Meja Tamu	1	Unit	-	Campuran
93	Meja Tamu	1	Unit	Baik	Campuran
94	Mesin Pemotong Rumput	13	Unit	Rusak Berat	
95	Mesin Absensi	1	Unit	Rusak Berat	
96	Mesin Bor	1	Unit	Baik	
97	Mesin Cuci Kendaraan	2	Unit	Baik	
98	Mesin Gerinda	1	Unit	Baik	
99	Mesin Las Listrik	1	Unit	Baik	
100	Mesin Pemotong Rumput	12	Unit	Baik	
101	Mesin Pompa Air	1	Unit	Kurang Baik	
102	Mesin Pompa Air	2	Unit	Rusak Berat	
103	Mobil Angkutan Roda 4	1	Unit	Baik	Camat
104	Mobil Angkutan Roda 4	1	Unit	Kurang Baik	
105	Mobil Dinas	2	Unit	Kurang Baik	
106	Mobil Dinas	1	Unit	Baik	
107	Mobil Tangki	1	Unit	Baik	
108	Monitor	1	Unit	Rusak Berat	
109	Note Book	1	Unit	Rusak Berat	
110	Papan Pengumuman	2	Unit	Kurang Baik	
111	Papan Pengumuman	31	Unit	-	
112	Papan Pengumuman	8	Unit	Baik	
113	Papan Tulis	1	Unit	Baik	

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Koefisien	Satuan	Kondisi	Keterangan
114	Pemadam Kebakaran	1	Unit	Baik	
115	Pencacah Sampah	1	Unit	Baik	
116	Perahu Barang	1	Unit	Rusak Berat	
117	Ph Meter	2	Unit	Baik	
118	Pickup	1	Unit	Kurang Baik	
119	Pickup	1	Unit	Rusak Berat	
120	Pickup	4	Unit	Baik	
121	Printer	6	Unit	Rusak Berat	
122	Printer	5	Unit	Kurang Baik	
123	Printer	7	Unit	Baik	
124	Proyektor	2	Unit	Kurang Baik	
125	Rak Kayu	1	Unit	Baik	
126	Router	1	Unit	Baik	
127	Ruang Pendingin Penyimpan Limbah Medis	1	Unit	Baik	(DAK)
128	Rumah Dinas	1	Unit	Kurang Baik	
129	Saluran Drainase	1	Unit	Baik	
130	Scanner	5	Unit	Baik	
131	Sepeda Motor	5	Unit	Kurang Baik	
132	Sepeda Motor	4	Unit	-	
133	Sepeda Motor	8	Unit	Rusak Berat	
134	Sepeda Motor	8	Unit	Baik	
135	Sound Sistem	2	Unit	Rusak Berat	
136	Sound Sistem	2	Unit	Baik	
137	Stabilisator	1	Unit	Rusak Berat	
138	Stabilisator	1	Unit	Baik	
139	Sumur Bor	1	Unit	Baik	
140	Sumur Gali	1	Unit	Baik	
141	Tablet	1	Unit	Rusak Berat	
142	Tablet	1	Unit	Baik	
143	Tanah	4	Unit	-	
144	Tangga	1	Unit	Baik	
145	Televisi	2	Unit	Baik	
146	Tempat Parkir	1	Unit	Baik	
147	Tempat Sampah Portabel	30	Unit	Baik	
148	Tempat Sampah Roda	10	Unit	Baik	
149	Tempat Sampah Terpilah	20	Unit	Baik	
150	Teralis	1	Unit	Kurang Baik	
151	Teralis	1	Unit	Baik	
152	Timbangan	1	Unit	Baik	
153	TPS Beton	1	Unit	Rusak Berat	
154	TPS Beton	1	Unit	-	
155	UPS	2	Unit	Rusak Berat	



No	Jenis Barang/ Nama Barang	Koefisien	Satuan	Kondisi	Keterangan
156	UPS	8	Unit	Baik	
157	Viar (Kendaraan Roda 3)	6	Unit	Rusak Berat	
158	Viar (Kendaraan Roda 3)	1	Unit	Kurang Baik	
159	Viar (Kendaraan Roda 3)	2	Unit	Baik	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjabbar Tahun 2025

c Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam sub-urusan lingkungan hidup, SPM diarahkan pada layanan dasar berupa penanganan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang merupakan bentuk perlindungan dasar terhadap hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewajiban untuk menerima, memverifikasi, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan secara tepat waktu dan sesuai prosedur.

Selain itu, meskipun belum secara eksplisit masuk dalam kategori SPM, pengelolaan persampahan rumah tangga dan sejenis rumah tangga juga menjadi salah satu bentuk pelayanan publik dasar yang dilaksanakan oleh DLH. Layanan ini meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah, serta pembinaan terhadap pemilahan dan pengolahan sampah di masyarakat.

Kinerja pemenuhan SPM ini menjadi bagian penting dalam evaluasi capaian kinerja daerah, dan menjadi dasar perencanaan strategis pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif. Dalam upaya memenuhi SPM, Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi pengaduan, serta kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus pencemaran.

Berikut ini adalah tabel pemenuhan SPM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Tabel 6 SPM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Satuan	Sumber Data Utama	Target	Realisasi	Keterangan
1	Penanganan Pengaduan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP	(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti / Total pengaduan yang diterima) x 100%	Persentase (%)	Data rekap pengaduan Dinas Lingkungan Hidup (manual dan online)	100%	100%	-
2	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Persentase rumah tangga yang terlayani pengangkutan sampah ke TPA	(Jumlah rumah tangga terlayani / Total rumah tangga di wilayah layanan) x 100%	Persentase (%)	Dinas Lingkungan Hidup (pengangkutan)	70%	35%	Belum meratanya cakupan pelayanan
3	Pengawasan Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi secara berkala sesuai ketentuan	(Jumlah kegiatan yang diawasi / Total kegiatan berizin lingkungan) x 100%	Persentase (%)	Daftar UKL-UPL, SPPL, AMDAL, dan Laporan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup	80%	80%	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Satuan	Sumber Data Utama	Target	Realisasi	Keterangan
4	Penyediaan Akses Pengaduan Lingkungan	Ketersediaan sistem dan kanal pengaduan masyarakat (offline dan online)	Tersedia/ Tidak Tersedia (berdasarkan checklist ketersediaan kanal layanan)	Tersedia/ Tidak Tersedia	Laporan pelayanan publik	Tersedia	Tersedia	Sudah tersedia, namun belum terintegrasi penuh
5	Edukasi dan Informasi Lingkungan kepada Masyarakat	Jumlah Kelompok yang mendapatkan edukasi dan informasi Lingkungan	Total Kelompok yang mendapatkan edukasi	Kelompok	Laporan kegiatan penyuluhan DLH, notulen, dokumentasi	12 Kegiatan	10 Kelompok	Masih terbatas sarana prasarana dan jangkauan wilayah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjabbar Tahun 2025

d Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sejumlah sasaran layanan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Sasaran layanan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting pelayanan, isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta tuntutan peningkatan kinerja ke depan.

Sasaran layanan yang pertama adalah terlaksananya penanganan pengaduan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup secara cepat, tepat, dan terstandar. Sasaran ini ditujukan untuk menjamin bahwa setiap laporan masyarakat mengenai pencemaran udara, air, tanah, atau kerusakan lingkungan lainnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal ini menjadi fondasi utama dalam upaya perlindungan lingkungan dan menjadi bagian dari pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan lingkungan hidup.

Sasaran layanan berikutnya adalah meningkatnya cakupan layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 sebesar 336.978 jiwa, serta asumsi timbulan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sebesar 0,4 kg/orang/hari (mengacu pada standar nasional untuk daerah non-metropolitan), maka estimasi timbulan sampah tahunan mencapai ±49.781 ton. Angka ini mencerminkan potensi beban pengelolaan sampah yang cukup besar dan dapat meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Tingginya timbulan sampah tersebut menegaskan pentingnya penyusunan dokumen Jakstrada di tahun mendatang sebagai dasar pengelolaan yang sistematis dan terukur.

Selanjutnya, sasaran layanan yang tak kalah penting adalah meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Penguatan peran pengawasan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum lingkungan dan pengendalian pencemaran. Dalam konteks ini, DLH dituntut untuk tidak hanya melakukan pengawasan administratif terhadap dokumen lingkungan (UKL-UPL, AMDAL, SPPL), tetapi juga melakukan pemantauan lapangan dan verifikasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup juga menetapkan sasaran layanan berupa meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi lingkungan hidup. Sasaran ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pelayanan edukasi dan penyuluhan di sekolah, komunitas, dan media sosial merupakan bentuk konkret dari sasaran ini.

Seluruh sasaran layanan tersebut saling berkaitan dan menjadi landasan dalam penjabaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan. Sasaran ini juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja pelayanan publik, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi sejumlah permasalahan faktual yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Permasalahan-permasalahan ini merupakan hasil dari evaluasi atas kondisi eksisting, data kinerja, serta pengamatan terhadap tren lingkungan global dan lokal. Dari berbagai permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi fokus utama pembangunan lingkungan hidup dalam lima tahun mendatang.

Salah satu permasalahan utama adalah meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim yang berdampak langsung terhadap wilayah pesisir dan permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fenomena banjir rob, cuaca ekstrem, serta perubahan pola musim menjadi semakin sering terjadi. Namun demikian, kapasitas adaptasi daerah terhadap perubahan iklim masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan belum terintegrasinya strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan sektoral serta keterbatasan data iklim lokal dan kelembagaan yang menangani pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan. Permasalahan ini melahirkan isu strategis penting, yaitu meningkatnya dampak perubahan iklim yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan berbasis mitigasi risiko.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan semakin menurunnya kualitas komponen lingkungan hidup, baik dari aspek air, udara, maupun lahan. Penurunan kualitas air permukaan terjadi di beberapa sungai akibat pencemaran domestik dan limbah usaha, sementara kualitas udara menurun di wilayah perkotaan dengan aktivitas kendaraan dan pembakaran terbuka. Terbatasnya ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis juga memperburuk daya dukung lingkungan. Sementara itu, pengawasan terhadap ketaatan dokumen lingkungan oleh kegiatan usaha masih belum optimal dan belum didukung dengan sistem pemantauan yang berbasis data. Permasalahan ini mengarah pada isu strategis tentang degradasi kualitas lingkungan hidup, yang menuntut penguatan pengendalian dampak lingkungan secara menyeluruh.

Di sisi lain, pengelolaan sampah juga masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Timbulan sampah yang diperkirakan mencapai lebih dari 49.000 ton per tahun belum seluruhnya tertangani dengan baik. Pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH belum menjangkau seluruh kecamatan, dan keberadaan TPS3R maupun sistem pemilahan sampah dari sumber belum berjalan secara optimal. Akibatnya, sampah masih banyak yang berakhir di lingkungan terbuka dan mencemari wilayah permukiman, badan air, serta menimbulkan bau dan estetika lingkungan yang buruk. Permasalahan ini melahirkan isu strategis tentang belum optimalnya pengelolaan sampah, yang menjadi agenda prioritas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume timbulan sampah setiap tahun.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat secara umum masih memiliki persepsi bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemahaman tentang pentingnya pemilahan sampah organik dan anorganik masih minim, bahkan praktik buang sampah sembarangan masih sering dijumpai di sejumlah titik. Edukasi dan penyuluhan lingkungan belum terlaksana secara masif, merata, dan berkelanjutan. Permasalahan ini berujung pada isu strategis rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, yang perlu diatasi melalui pendekatan pemberdayaan, edukasi, dan penguatan peran serta masyarakat.

b. Isu Strategis

Berdasarkan keempat permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam

perencanaan lima tahun mendatang, yaitu: meningkatnya dampak perubahan iklim, degradasi kualitas lingkungan hidup, belum optimalnya pengelolaan sampah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Isu-isu strategis ini akan dijadikan pijakan dalam penyusunan sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas perangkat daerah secara menyeluruh dan terukur.

Tabel 7 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Global	Isu Lingkungan Dinamis Nasional	Isu Lingkungan Dinamis Regional	Isu Strategis yang Ditetapkan
1	2	3	4	5	6	7
Sumber daya air, udara, dan tanah sebagai komponen utama kualitas lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran dan degradasi	Tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan	Perubahan iklim, krisis kualitas air dan udara (IPCC 2023, UNEP 2022)	Penurunan IKLH nasional, pencemaran lintas batas (KLHK, IKLH 2023)	Pencemaran Sungai Batanghari & kabut asap lintas daerah (DLH Prov. Jambi, KLHK)	Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
Volume timbulan sampah domestik yang tinggi, dengan potensi pemilahan & daur ulang	Rendahnya volume sampah yang terkelola dan minimnya fasilitas TPS3R	Produksi sampah meningkat tanpa sistem pengelolaan terintegrasi	Ancaman plastik laut dan mikroplastik (UNEP 2021, SDGs 2030)	Target pengurangan sampah 30%, penanganan 70% (Permen LHK No. P.75/2019)	Timbulan sampah meningkat di perkotaan & pesisir (DLH Prov. Jambi)	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah
Modal sosial dan komunitas lokal yang bisa digerakkan dalam edukasi lingkungan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Kelembagaan masyarakat belum diperkuat dalam perlindungan LH	Agenda SDGs: perubahan perilaku masyarakat (UNDP, SDGs Indonesia)	Program Gerakan Lingkungan Hidup Nasional (Germas LH, RPJMN 2020–2024)	Lemahnya forum masyarakat peduli LH (DLH Tanjab Barat, Forum DAS Jambi)	Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pelestarian Lingkungan
Kawasan gambut, pesisir, dan lahan basah yang rentan terhadap perubahan iklim	Minimnya dokumen adaptasi dan peta risiko iklim daerah	Potensi krisis air, kebakaran lahan, dan cuaca ekstrem	Krisis iklim global, bencana ekologis (IPCC AR6, UNDRR)	Komitmen nasional FoLU Net Sink 2030, SRN LHK (KLHK 2022)	Kerentanan iklim tinggi di wilayah pesisir & gambut Jambi (SIGAB Prov. Jambi, RPJMD Prov.)	Meningkatnya Dampak Perubahan Iklim

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Renstra DLH Kabupaten Tanjabbar Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan arah tujuan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

Tujuan tersebut merupakan refleksi dari peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkelanjutan, melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Berdasarkan mandat tersebut, maka tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai berikut:

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam.”

Tujuan ini menjadi landasan dalam perumusan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup akan difokuskan pada pengendalian pencemaran air, udara, dan lahan; peningkatan efektivitas pengelolaan sampah; serta pelestarian sumber daya alam dan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan.

B. Sasaran Renstra DLH Kabupaten Tanjabbar Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam,” Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan empat sasaran strategis utama. Sasaran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sasaran strategis ini menjadi arah bagi penyusunan indikator kinerja utama, program, dan kegiatan selama periode 2025–2029, serta berperan sebagai instrumen

pengukur efektivitas pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup daerah. Adapun keempat sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan dan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Peningkatan kepatuhan akan dilakukan melalui pemantauan berkala terhadap dokumen lingkungan, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, dan penguatan sistem informasi pengendalian dampak lingkungan.

Meningkatkan Pengelolaan Sampah yang Menyeluruh dan Berbasis Masyarakat

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan, tetapi juga pada pengurangan dari sumber, pemilahan, daur ulang, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dikembangkan mencakup penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur TPS3R dan bank sampah, serta perluasan cakupan layanan persampahan hingga tingkat desa dan kecamatan.

Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, dan Lahan

Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan kualitas air permukaan, udara ambien, serta rehabilitasi lahan yang terdegradasi menjadi fokus utama dalam rangka menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Fungsi Ekologi dan Sosial

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik yang bersifat publik maupun privat. RTH dirancang tidak hanya sebagai elemen estetika, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dalam menurunkan suhu udara, menyerap karbon, serta sebagai ruang interaksi sosial masyarakat. Strategi pengelolaan mencakup penataan, perlindungan, dan pemulihan kawasan hijau yang terintegrasi dalam tata ruang wilayah.

Keempat sasaran tersebut akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah, serta acuan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Tabel 8 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam									
		Meningkatnya Kepatuhan Kegiatan/ Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	75%	78%	82%	86%	90%	90%	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah Yang Menyeluruh Dan Berbasis Masyarakat	Persentase sampah yang tertangani (dibatasi, dan/atau diolah)	35%	50%	55%	60%	65%	65%	
			Persentase pengurangan timbulan sampah dari sumber (3R: reduce, reuse, recycle)	5,19%	6,79%	9,31%	12,67%	15,00%	15,00%	
		Meningkatnya Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, Dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,60	72,80	73,00	73,20	73,40	73,40	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Ekologi Dan Sosial	Persentase RTH yang terkelola dengan baik	55%	58%	63%	67%	70%	70%	

Kuala Tungkal, September 2025
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 19680116 199703 1 002

C. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam” serta mendukung pencapaian empat sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan lima strategi utama. Strategi ini disusun dengan memperhatikan permasalahan aktual, isu strategis yang dihadapi, serta kebutuhan peningkatan kualitas tata kelola lingkungan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas, pelaksanaan verifikasi dan pemantauan dokumen lingkungan secara rutin, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Pemanfaatan sistem informasi pengawasan juga akan didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan Ekonomi Sirkular

Strategi ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui konsep ekonomi sirkular. Pendekatan yang dilakukan meliputi pengembangan fasilitas TPS3R dan bank sampah, kampanye pengurangan sampah dari sumber, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan dalam mendukung pengelolaan sampah lokal. Model bisnis daur ulang dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi akan dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pelestarian Kualitas Komponen Lingkungan: Air, Udara, dan Tanah

Strategi ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya lingkungan melalui pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas secara berkala. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan fungsi laboratorium lingkungan, pengawasan terhadap limbah domestik dan kegiatan usaha, serta pelaksanaan program pemulihan lahan terdegradasi. Pendekatan preventif dan represif akan dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Penguatan Peran Serta Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Strategi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan edukasi, penyuluhan, serta pelibatan komunitas lingkungan hidup. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi pelaporan masyarakat, sistem informasi pengelolaan sampah, serta pemantauan kualitas lingkungan berbasis data digital akan diperluas guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Pengamanan dan Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Elemen Ekologis dan Sosial

Strategi ini diarahkan pada perlindungan kawasan RTH eksisting serta penambahan luasan RTH baru yang dirancang untuk memiliki fungsi ekologis (penyerap polusi, penyimpan karbon) dan fungsi sosial (ruang interaksi publik, keindahan kota). Kegiatan yang mendukung strategi ini meliputi penanaman pohon, rehabilitasi kawasan hijau, perencanaan RTH dalam dokumen tata ruang, serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan taman kota dan kawasan konservasi.

Kelima strategi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2025–2029. Dengan pelaksanaan strategi yang tepat dan konsisten, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 9 Penahapan Renstra PD

Sasaran	Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 5 (2029)
Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, lahan)	Pemutakhiran Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, lahan)	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dan penyusunan RPPLH	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dengan acuan kerja RPPLH	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dengan acuan kerja RPPLH

Sasaran	Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 5 (2029)
Meningkatkan Pengelolaan Sampah Yang Menyeluruh Dan Berbasis Masyarakat	Peningkatan persentase penanganan sampah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Peningkatan Persentase penanganan dan pengolahan sampah di Tanjung Jabung Barat	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peran serta masyarakat	Peningkatan pengelolaan sampah melalui Peran serta masyarakat dan pengelolaan optimal di sumber	Peningkatan pengelolaan sampah melalui Peran serta masyarakat dan pengelolaan optimal di sumber
Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, Dan Lahan	Pengelolaan ruang terbuka hijau (taman) yang menjadi kewenangan DLH dengan baik	Pengelolaan ruang terbuka hijau (taman) dengan optimalisasi taman median jalan	Optimalisasi RTH melalui rehabilitasi ex-TPA menjadi taman Kehati Tanjung Jabung Barat	Optimalisasi RTH (Taman Kehati dan Taman bukan Kehati) dengan baik	Optimalisasi RTH (Taman Kehati dan Taman bukan Kehati) dengan memenuhi fungsi ekologi dan sosial
Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Ekologi Dan Sosial	Pengawasan dan Penaatan Dunia Usaha terhadap lingkungan	Optimalisasi ketaatan dunia usaha dengan penurunan sengketa lingkungan di Tanjung Jabung Barat	Peningkatan ketaatan dunia usaha terhadap PPLH dengan peningkatan kinerja serta fasilitasi lingkungan	Peningkatan ketaatan dunia usaha terhadap PPLH dengan peningkatan kinerja serta fasilitasi lingkungan	Peningkatan ketaatan dunia usaha terhadap PPLH dengan peningkatan kinerja serta fasilitasi lingkungan

D. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam” serta melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sejumlah arah kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran lebih operasional dari strategi, dan disusun untuk memastikan bahwa sasaran strategis dapat dicapai secara terukur, efisien, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 terdiri dari:

Optimalisasi pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dampak lingkungan melalui pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur terhadap seluruh kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pengawas, pemutakhiran data perizinan lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pemantauan.

Pengembangan TPS3R dan ekosistem bank sampah

Arah kebijakan ini fokus pada peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dengan mendorong keberadaan dan kinerja TPS3R, pengembangan ekosistem bank sampah yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan dan pembinaan kelompok pengelola sampah. Dinas LH juga akan memfasilitasi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memperluas model bisnis ekonomi sirkular.

Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis serta badan air

Kebijakan ini diarahkan untuk memulihkan kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan yang mengalami degradasi, baik di daratan (lahan kritis, sempadan sungai) maupun badan air (sungai, kanal, rawa). Kegiatan yang mendukung arah ini meliputi penanaman vegetasi lokal, pembersihan sungai, pembuatan sumur resapan, dan konservasi ekosistem riparian untuk menjaga keseimbangan tata air dan daya dukung lingkungan.

Pemantauan kualitas lingkungan berbasis data digital

Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan sistem informasi lingkungan hidup yang berbasis teknologi informasi dan data realtime. Dinas LH akan mengembangkan dashboard pemantauan kualitas air dan udara, sistem peringatan dini pencemaran, serta integrasi data laboratorium dengan platform analisis untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Integrasi ruang terbuka hijau (RTH) dalam penataan ruang daerah

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan RTH menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen tata ruang kabupaten. Selain menambah luasan RTH, kebijakan ini juga mencakup penataan kawasan terbuka yang multifungsi—berfungsi ekologis, estetis, dan sosial serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang hijau publik.

Kelima arah kebijakan tersebut disusun secara sinergis dan saling melengkapi, untuk memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini juga menjadi landasan dalam pemilihan program, kegiatan, dan pengalokasian sumber daya selama periode perencanaan lima tahun.

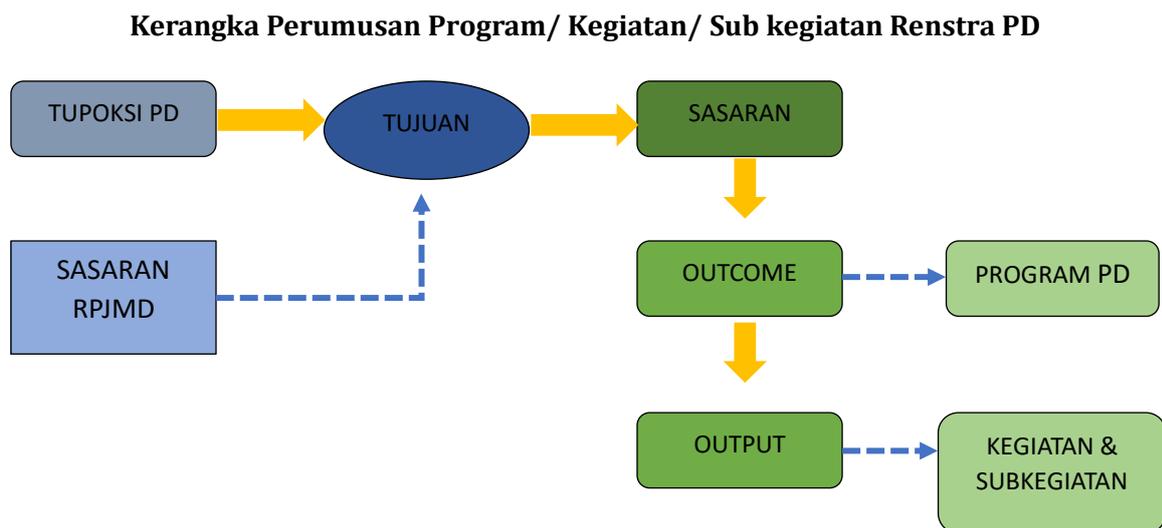
Tabel 10 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029

ISU STRATEGIS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Dampak Perubahan Iklim, 2. Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup, 3. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah, 4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pelestarian Lingkungan. 			
VISI :			
"Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI "			
MISI III:			
"Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota."			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan PPLH 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pengawasan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan
	2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Yang Menyeluruh Dan Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan ekonomi sirkular 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan TPS3R dan ekosistem bank sampah
	3. Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, Dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian kualitas komponen lingkungan: air, udara, dan tanah • Penguatan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis serta badan air • Pemantauan kualitas lingkungan berbasis data digital
	4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Ekologi Dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamanan dan penambahan ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi RTH dalam penataan ruang daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam” serta mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, telah ditentukan sejumlah program prioritas dan non-prioritas yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama periode perencanaan lima tahun.



Bagan 3 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Semua program yang dirumuskan telah mengacu pada nomenklatur resmi terkini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Pemutakhiran Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1. Program Prioritas Strategis Perangkat Daerah

Program-program prioritas ditetapkan berdasarkan relevansinya terhadap kondisi aktual daerah, permasalahan lingkungan hidup, serta kontribusinya dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup. Program tersebut adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Mendukung penyusunan dan penguatan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti KLHS, RPPLH, dan dokumen kebijakan sektoral lainnya berbasis data dan kajian lingkungan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Berfokus pada pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta pemulihan lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan dan pelaksanaan pengendalian pencemar.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati lokal, termasuk konservasi spesies endemik dan ekosistem penting melalui pendekatan berbasis komunitas dan wilayah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Mendorong kepatuhan kegiatan/usaha melalui pengawasan izin lingkungan, evaluasi dokumen, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan PPLH.

5. Program Pengelolaan Persampahan

Menjadi tulang punggung dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular, pengembangan TPS3R, edukasi pemilahan, dan integrasi bank sampah.

2. *Program Penunjang Wajib (Non-Prioritas Strategis, tapi Esensial)*

Selain program-program prioritas strategis, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan melalui penyediaan layanan manajerial, administratif, dan operasional. Meskipun tidak menghasilkan keluaran substansi lingkungan hidup, program ini bersifat wajib dan dilaksanakan secara berkelanjutan karena menjadi fondasi teknis dan manajerial dalam mendukung seluruh program strategis DLH.

Ruang lingkup program ini meliputi seluruh aspek pengelolaan internal perangkat daerah, yang terdiri atas:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD), pengelolaan anggaran tahunan, serta evaluasi capaian kinerja melalui SIPD.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, dan pemrosesan pembayaran atas kegiatan dinas.
- **Administrasi Barang Milik Daerah (BMD)**
Menjamin tertib pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset milik daerah yang digunakan oleh perangkat daerah.
- **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
Mengelola potensi penerimaan daerah yang berada di bawah kewenangan DLH, seperti retribusi persampahan (jika berlaku).
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Menangani urusan kepegawaian ASN seperti pengusulan formasi, kenaikan pangkat, disiplin pegawai, dan pengembangan SDM.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Termasuk urusan surat-menyurat, pengarsipan, dokumentasi, serta pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Proses pengadaan barang dan jasa, baik fisik maupun non fisik, yang mendukung pelaksanaan kegiatan teknis maupun administrasi.
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Pemberian dukungan jasa seperti tenaga kebersihan, pengamanan, operator komputer, dan layanan teknis pendukung lainnya.
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, alat berat, jaringan listrik, dan perangkat kerja lainnya agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal.

Dengan melaksanakan program ini secara konsisten dan profesional, Dinas Lingkungan Hidup memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

3. Program Non-Prioritas

Beberapa program bersifat non-prioritas strategis, namun tetap dapat dilaksanakan secara terbatas berdasarkan ketersediaan anggaran, kondisi darurat, atau sinergi dengan program pusat/provinsi:

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah B3
Difokuskan pada pengelolaan limbah B3 dari sumber domestik dan kegiatan usaha tertentu yang signifikan menimbulkan risiko lingkungan.
2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA Terkait PPLH
Bertujuan memberikan ruang partisipasi kepada komunitas adat dalam perlindungan lingkungan hidup jika ditemukan keberadaan hukum adat dan relevansi wilayah adat.
3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program insentif berbasis apresiasi yang pelaksanaannya disesuaikan dengan dukungan anggaran, seperti Adiwiyata, Proklim, atau penghargaan inovator lingkungan.
4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Fokus pada peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, pelatihan, kampanye, dan pendampingan.
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Memastikan adanya kanal pengaduan yang responsif dan sistematis dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

2. Uraian Kegiatan

A. Uraian Kegiatan Prioritas

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kegiatan ini bertujuan menyusun dokumen perencanaan jangka panjang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung wilayah. RPPLH akan menjadi referensi lintas sektor dalam pengambilan keputusan pembangunan, sekaligus memperkuat integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan daerah.

Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS dilaksanakan sebagai bentuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini meliputi penilaian kebijakan, rencana, dan program, serta penyusunan rekomendasi lingkungan hidup strategis yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini difokuskan pada tindakan preventif terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap kegiatan usaha, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembinaan teknis kepada pelaku kegiatan. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas air, udara, dan tanah di wilayah kabupaten.

Kegiatan: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dilaksanakan ketika terjadi insiden pencemaran atau kerusakan lingkungan yang memerlukan penanganan segera. Kegiatan ini mencakup investigasi lapangan, koordinasi lintas sektor, pengambilan sampel lingkungan, dan penyusunan rekomendasi teknis pemulihan kondisi lingkungan secara bertahap.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Kegiatan ini mencakup identifikasi, inventarisasi, dan konservasi keanekaragaman hayati lokal, baik flora maupun fauna. Dilaksanakan melalui kolaborasi dengan lembaga riset, masyarakat adat, dan komunitas lokal, kegiatan ini bertujuan menjaga kelestarian spesies endemik serta memperkuat ekosistem yang mendukung keseimbangan lingkungan daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap kegiatan atau usaha yang telah mendapatkan izin lingkungan menjalankan komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen izin. Dilakukan melalui pemeriksaan lapangan, peninjauan pelaporan, serta pemberian sanksi administratif bila ditemukan ketidakpatuhan.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini diarahkan untuk membentuk kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Sasaran utamanya meliputi sekolah, kelompok masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Bentuk kegiatannya antara lain pelatihan teknis pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga penyuluhan dampak pencemaran.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH

Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik dalam merespons aduan masyarakat terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dinas LH melakukan verifikasi lapangan, mengkoordinasikan tindak lanjut teknis, serta memberi informasi kepada pelapor. Kegiatan ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penanganan isu lingkungan.

7. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan: Pengelolaan Sampah

Dilaksanakan untuk meningkatkan layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, kegiatan ini mencakup penataan TPS, pembinaan bank sampah dan TPS3R,

serta penguatan armada dan sistem pengangkutan. Juga termasuk edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya.

B. Kegiatan Non-Prioritas

1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3

Kegiatan: Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas sementara bagi penyimpanan limbah B3 yang timbul dari kegiatan pelayanan atau operasional terbatas di lingkungan pemerintah daerah. Meskipun belum menjadi fokus utama, pengelolaan limbah B3 perlu disiapkan untuk mengantisipasi risiko pencemaran, terutama dari sektor kesehatan, perbengkelan, atau kegiatan teknis yang menghasilkan limbah berbahaya.

2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA Terkait PPLH

Kegiatan: Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA

Kegiatan ini mendukung pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pelaksanaannya bersifat selektif dan mempertimbangkan data valid terkait keberadaan komunitas MHA di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal

Difokuskan pada penguatan pengetahuan tradisional dan praktik lokal yang ramah lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan, dokumentasi praktik kearifan lokal, serta fasilitasi akses masyarakat adat dalam pengambilan keputusan lingkungan.

3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap individu atau kelompok masyarakat yang telah berkontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan. Meski pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran dan indikator pencapaian tertentu, kegiatan ini penting untuk membangun budaya kompetitif dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelestarian lingkungan.

3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dan terukur. Penyusunan ini mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengintegrasikan capaian kinerja dalam kerangka waktu lima tahun (2025–2029).

Rencana sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian output dan outcome yang relevan dengan sasaran kinerja perangkat daerah, dengan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual, prioritas daerah, dan ketersediaan anggaran.

Tabel berikut menyajikan rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerja, target capaian tahunan, dan estimasi pendanaan selama periode Renstra tahun 2025–2029.

Tabel 11 Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
										2025		2026		2027		2028		2029				2030					
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15				
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	X	X	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	86%	100%	7.969.821.067	100%	34.089.500.000	100%	36.600.000.000	100%	22.100.500.000	100%	22.801.000.000	100%	22.801.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat				
						2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun	7 Laporan	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	1.640.000.000	1 Laporan	1.680.000.000	1 Laporan	1.720.000.000	1 Laporan	1.760.000.000	1 Laporan	1.760.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat		
						0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	250.000.000	8 Dokumen	410.000.000	8 Dokumen	420.000.000	8 Dokumen	430.000.000	8 Dokumen	440.000.000	8 Dokumen	440.000.000	8 Dokumen	440.000.000	Sekretariat	DLH
						0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	410.000.000	4 Dokumen	420.000.000	4 Dokumen	430.000.000	4 Dokumen	440.000.000	4 Dokumen	440.000.000	4 Dokumen	440.000.000	Sekretariat	DLH
						0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	410.000.000	1 Laporan	420.000.000	1 Laporan	430.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	Sekretariat	DLH
						0007			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	410.000.000	1 Laporan	420.000.000	1 Laporan	430.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	1 Laporan	440.000.000	Sekretariat	DLH
						2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan OPD	5 Laporan	4 Laporan	3.916.821.067	4 Laporan	6.630.000.000	4 Laporan	6.730.000.000	4 Laporan	6.830.000.000	4 Laporan	6.930.000.000	4 Laporan	6.930.000.000	4 Laporan	6.930.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
				00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	24 Orang/bulan	3.342.071.067	32 Orang/bulan	5.050.000.000	34 Orang/bulan	5.100.000.000	36 Orang/bulan	5.150.000.000	38 Orang/bulan	5.200.000.000	38 Orang/bulan	5.200.000.000	Sekretariat	DLH
				00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen 2	2 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	710.000.000	1 Dokumen	720.000.000	1 Dokumen	730.000.000	1 Dokumen	740.000.000	1 Dokumen	740.000.000	Sekretariat	DLH
				00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen -	1 Dokumen	410.000.000	1 Dokumen	420.000.000	1 Dokumen	430.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	440.000.000	1 Dokumen	440.000.000	Sekretariat	DLH
				00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan -	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	190.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Sekretariat	DLH
				00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan 4	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	150.000.000	4 Laporan	160.000.000	4 Laporan	170.000.000	4 Laporan	180.000.000	4 Laporan	180.000.000	Sekretariat	DLH
				00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen 2	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	140.000.000	2 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	170.000.000	Sekretariat	DLH
			2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan data Barang Milik Daerah dalam bentuk digital yang terstruktur dan terverifikasi	Laporan 1	Laporan -	-	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	320.000.000	1 Laporan	340.000.000	1 Laporan	360.000.000	1 Laporan	360.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanggung Jabung Barat
				00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan -	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	Sekretariat	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
							2025		2026		2027		2028		2029				2030			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
				00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	170.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	180.000.000	Sekretariat	DLH		
			2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan	Dokumen	1	Rp 140.000.000	260.000.000	Rp 140.000.000	500.000.000	Rp 140.000.000	320.000.000	Rp 140.000.000	340.000.000	Rp 140.000.000	360.000.000	Rp 140.000.000	360.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	
				00 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	-	4 Laporan	200.000.000									Sekretariat	DLH		
				00 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	12	12 Laporan	130.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000	Sekretariat	DLH
				00 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	8.137 Dokumen	13.200 Dokumen	130.000.000	12 Dokumen	150.000.000	12 Dokumen	160.000.000	12 Dokumen	170.000.000	12 Dokumen	180.000.000	12 Dokumen	180.000.000	Sekretariat	DLH	
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang telah dikelola dengan baik dan sesuai standar administrasi		100%	100%	80.000.000	100%	300.000.000	100%	330.000.000	100%	360.000.000	100%	390.000.000	100%	390.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	
				00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Paket	72 Paket	80.000.000	74 Paket	100.000.000	74 Paket	110.000.000	74 Paket	120.000.000	74 Paket	130.000.000	74 Paket	130.000.000	Sekretariat	DLH	
				00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	Sekretariat	DLH
				00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	Sekretariat	DLH
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum		78%	100%	775.000.000	100%	1.445.000.000	100%	1.565.000.000	100%	1.685.000.000	100%	1.805.000.000	100%	1.805.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
				00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Paket	2 Paket	65.000.000	6 Paket	75.000.000	6 Paket	80.000.000	6 Paket	85.000.000	6 Paket	90.000.000	6 Paket	90.000.000	Sekretariat	DLH
				00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	400 Paket	130.000.000	400 Paket	150.000.000	400 Paket	160.000.000	400 Paket	170.000.000	400 Paket	180.000.000	400 Paket	180.000.000	Sekretariat	DLH
				00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	- Paket	12 Paket	80.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	12 Paket	40.000.000	Sekretariat	DLH
				00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Paket			12 Paket	80.000.000	12 Paket	85.000.000	12 Paket	90.000.000	12 Paket	95.000.000	12 Paket	95.000.000	Sekretariat	DLH
				00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan ¹	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	1.100.000.000	1 Laporan	1.200.000.000	1 Laporan	1.300.000.000	1 Laporan	1.400.000.000	1 Laporan	1.400.000.000	Sekretariat	DLH
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		115 Unit	100 Unit	1.200.000.000	221 Unit	18.725.000.000	222 Unit	20.745.000.000	201 Unit	5.555.000.000	201 Unit	5.565.000.000	201 Unit	5.565.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barata
				00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- Unit			8 Unit	1.200.000.000	8 Unit	1.200.000.000							Sekretariat	DLH
				00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- Unit			12 Unit	12.000.000.000	13 Unit	14.000.000.000							Sekretariat	DLH
				00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- Unit			100 Unit	65.000.000	100 Unit	65.000.000	100 Unit	65.000.000	100 Unit	65.000.000	100 Unit	65.000.000	Sekretariat	DLH
				00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Unit			1 Unit	160.000.000	1 Unit	180.000.000	1 Unit	190.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Sekretariat	DLH



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
				00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	115 Unit	100 Unit	1.200.000.000	100 Unit	5.300.000.000	Sekretariat	DLH								
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Laporan	3 Laporan	438.000.000	3 Laporan	1.589.500.000	3 Laporan	1.700.000.000	3 Laporan	1.810.500.000	3 Laporan	1.921.000.000	3 Laporan	1.921.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat	
				00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.000.000	Sekretariat	DLH
				00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	280.000.000	1 Laporan	290.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	310.000.000	Sekretariat	DLH
				00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	1.300.000.000	1 Laporan	1.400.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.600.000.000	1 Laporan	1.600.000.000	Sekretariat	DLH
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39 Unit	44 Unit	700.000.000	169 Unit	2.960.000.000	168 Unit	3.210.000.000	168 Unit	3.460.000.000	168 Unit	3.710.000.000	168 Unit	3.710.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat	
				00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	38 Unit	350.000.000	40 Unit	440.000.000	39 Unit	480.000.000	39 Unit	520.000.000	39 Unit	560.000.000	39 Unit	560.000.000	Sekretariat	DLH
				00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Unit	- Unit	-	15 Unit	440.000.000	15 Unit	480.000.000	15 Unit	520.000.000	15 Unit	560.000.000	15 Unit	560.000.000	Sekretariat	DLH
				00 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	- Unit	- Unit	-	3 Unit	650.000.000	3 Unit	700.000.000	3 Unit	750.000.000	3 Unit	800.000.000	3 Unit	800.000.000	Sekretariat	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2025		2026		2027		2028		2029				2030		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	
						00 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	- Unit			1 Unit	440.000.000	1 Unit	480.000.000	1 Unit	520.000.000	1 Unit	560.000.000	1 Unit	560.000.000	Sekretariat	DLH	
						00 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	6 Unit	350.000.000	2 Unit	440.000.000	2 Unit	480.000.000	2 Unit	520.000.000	2 Unit	560.000.000	2 Unit	560.000.000	Sekretariat	DLH	
						00 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Unit			54 Unit	440.000.000	54 Unit	480.000.000	54 Unit	520.000.000	54 Unit	560.000.000	54 Unit	560.000.000	Sekretariat	DLH	
						00 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Unit			54 Unit	110.000.000	54 Unit	110.000.000	Sekretariat	DLH							
			2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/ Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	Persentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	2	1	1	0	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE REKOMENDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI	10%	14%	250.000.000	42%	500.000.000	72%	750.000.000	86%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						2.	01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Dokumen				1 Dokumen	500.000.000							Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat	
						00	06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen				1 Dokumen	500.000.000							DLH Bidang Tata Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
										2025		2026		2027		2028		2029				2030	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15
						2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJM D	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJM D Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000					1 Dokumen	250.000.000			1 Dokumen	250.000.000	DLH Bidang Tata Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen			2 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000					DLH Bidang Tata Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	3. Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, Dan Lahan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan	2	1	0		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS AIR DAN UDARA	77,36 Indeks	78,20 Indeks	970.000.000	78,40 Indeks	855.000.000	78,60 Indeks	1.050.000.000	78,80 Indeks	1.138.000.000	79,00 Indeks	1.220.000.000	79,00 Indeks	1.220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3 Laporan	21 Laporan	970.000.000	25 Laporan	755.000.000	28 Laporan	940.000.000	28 Laporan	1.018.000.000	28 Laporan	1.090.000.000	28 Laporan	1.090.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen data Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	430.000.000	1 Dokumen	430.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
						0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan			3 Laporan	165.000.000	3 Laporan	180.000.000	3 Laporan	198.000.000	3 Laporan	200.000.000	3 Laporan	200.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2025		2026		2027		2028		2029				2030		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
				00 07	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	- Lokasi	20 Lokasi	720.000.000	20 Lokasi	160.000.000	20 Lokasi	170.000.000	20 Lokasi	180.000.000	20 Lokasi	190.000.000	20 Lokasi	190.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
				00 08	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan			3 Laporan	120.000.000	3 Laporan	130.000.000	3 Laporan	140.000.000	3 Laporan	140.000.000	3 Laporan	140.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
				00 11	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	130.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
			2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan			1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
				00 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan			1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	130.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Fungsi Ekologi Dan Sosial	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE RTH	80%	90%	3.760.000.000	95%	5.040.000.000	96%	5.570.000.000	96%	5.600.000.000	98%	5.900.000.000	98%	5.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
					2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	80%	90%	3.760.000.000	95%	5.040.000.000	96%	5.570.000.000	96%	5.600.000.000	98%	5.900.000.000	98%	5.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
					0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun						1 Dokumen	250.000.000							DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DLH
					0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Ha	21 Ha	2.660.000.000	22 Ha	840.000.000	22 Ha	920.000.000	22 Ha	1.000.000.000	22 Ha	1.100.000.000	22 Ha	1.100.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
					0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	18 Unit	18 Unit	1.100.000.000	1.100 Unit	3.100.000.000	1.200 Unit	3.200.000.000	1.300 Unit	3.300.000.000	1.400 Unit	3.400.000.000	1.400 Unit	3.400.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
					0008	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	- Unit			1 Unit	1.100.000.000	1 Unit	1.200.000.000	1 Unit	1.300.000.000	1 Unit	1.400.000.000	1 Unit	1.400.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								2025		2026		2027		2028		2029				2030		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4		5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Yang Menyeluruh Dan Berbasis Masyarakat	Persentase sampah yang dikelola secara menyeluruh dan berbasis masyarakat	2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERESENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA	90%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
							2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	90%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
								0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	50.000.000	DLH Bidang Pengelolan Sampah Dan Limbah B3
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH	44%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Barat
							2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44%	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
											2025		2026		2027		2028		2029				2030	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4					5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15
							00 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 Dokumen	30 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	3 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	140.000.000	3 Dokumen	140.000.000	DLH Bidang Tata Lingkungan Hidup	DLH
							00 09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	30 Badan Usaha	90.000.000	30 Badan Usaha	100.000.000	30 Badan Usaha	100.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat						
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	2	1	1	0	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAA N MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PERSENTASE MHA YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA	1 Dokumen	100%	140.000.000	100%	300.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
							2. 01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	300.000.000									Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
										2025		2026		2027		2028		2029				2030				
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.			
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15			
						00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen ¹	1	140.000.000					1	300.000.000								DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
						2. 02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibangun	Dokumen	-	-					1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	
						00 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	-	-					1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	1	160.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	2	1	0	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA	100%	100%	160.000.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	370.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
										2025		2026		2027		2028		2029				2030		
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15	
						2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sosialisasi/ pelatihan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	160.000.000	9 Kegiatan	330.000.000	9 Kegiatan	350.000.000	9 Kegiatan	370.000.000	9 Kegiatan	410.000.000	9 Kegiatan	410.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	
						0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	- Dokumen	-	-	3 Dokumen	160.000.000	3 Dokumen	170.000.000	3 Dokumen	180.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DLH	
						0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 Lembaga	6 Lembaga	160.000.000	6 Lembaga	170.000.000	6 Lembaga	180.000.000	6 Lembaga	190.000.000	6 Lembaga	210.000.000	6 Lembaga	210.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DLH	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	1. Meningkatkan Kepatuhan Kegiatan/ Usaha Terhadap Ketentuan Pengelolaan Dan Perlindungan LH	Persentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	2	1	0	1	1	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	50%	-	60%	55.000.000	65%	60.000.000	70%	65.000.000	75%	70.000.000	75%	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat
						2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perolehan penghargaan kota sehat adipura/ sekolah adiwiyata/ Dokumen IKPLHD/ SLHD	- Penghargaan	-	-	1 Penghargaan	55.000.000	1 Penghargaan	60.000.000	1 Penghargaan	65.000.000	1 Penghargaan	70.000.000	1 Penghargaan	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
							2025		2026		2027		2028		2029				2030						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.					
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15		
					00 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	- Entitas			1 Entitas	55.000.000	1 Entitas	60.000.000	1 Entitas	65.000.000	1 Entitas	70.000.000	Entitas	1	70.000.000	DLH Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	DLH		
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	3. Meningkatkan Kualitas Komponen Lingkungan Hidup: Air, Udara, Dan Lahan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan	2	1	1	0	PROGRAM PENANGANGAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA/ KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanggung Barat		
						2	01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	100%	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanggung Barat	
							00	05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara ³	3 Perkara	100.000.000	5 Perkara	110.000.000	4 Perkara	110.000.000	Perkara ³	110.000.000	Perkara ²	110.000.000	Perkara ²	110.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
							00	09	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti / ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti / ditangani	Pengaduan ³	3 Pengaduan	100.000.000	5 Pengaduan	110.000.000	4 Pengaduan	110.000.000	Pengaduan ³	110.000.000	Pengaduan ²	110.000.000	Pengaduan ²	110.000.000	DLH Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																													
								2025		2026		2027		2028		2029				2030																												
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.																											
1	2	3	4		5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15																											
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	2. Meningkatkan Pengelolaan Sampah Yang Menyeluruh Dan Berbasis Masyarakat	Persentase sampah yang dikelola secara menyeluruh dan berbasis masyarakat	2	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	INDEKS KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH	46%	48,00 Indeks	18.770.000.000	50,00 Indeks	57.545.000.000	52,00 Indeks	59.125.000.000	54,00 Indeks	60.955.000.000	55,00 Indeks	62.900.000.000	55,00 Indeks	62.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat																										
																							2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	46%	35%	18.770.000.000	50%	57.545.000.000	55%	59.125.000.000	60%	60.955.000.000	65%	62.900.000.000	65%	62.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	Kab. Tanjung Jabung Barat								
																								0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	6			2	Kelompok	240.000.000		3	Kelompok	260.000.000	3	Kelompok	280.000.000	3	Kelompok	310.000.000	3	Kelompok	310.000.000	DLH Bidang Pengelolaaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat
																								0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen				1	Dokumen	45.000.000		1	Dokumen	45.000.000									DLH Bidang Pengelolaaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat	
																								0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1.125 Unit	1.000 Unit	10.000.000.000	1.100 Unit	44.800.000.000	1.200 Unit	45.500.000.000	1.300 Unit	46.000.000.000	1.400 Unit	46.500.000.000	1.400 Unit	46.500.000.000	DLH Bidang Pengelolaaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat							



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi								
							2025		2026		2027		2028		2029				2030							
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.						
1	2	3	4				5	6	7	8		9		10		11		12		13		14	15			
					00 08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen			1 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	145.000.000										DLH Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat	
					00 12	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	- Ton			27.000 Ton	5.700.000.000	28.000 Ton	6.300.000.000	29.000 Ton	7.000.000.000	30.000 Ton	7.700.000.000	30.000 Ton	7.700.000.000				DLH Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat	
					00 17	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	40.917 Ton	1.400 Ton	8.770.000.000	1.900 Ton	110.000.000	2.700 Ton	120.000.000	3.800 Ton	130.000.000	4.500 Ton	140.000.000	4.500 Ton	140.000.000	4.500 Ton	140.000.000			DLH Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat
					00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	- Ton			25.600 Ton	6.200.000.000	26.500 Ton	6.800.000.000	27.400 Ton	7.500.000.000	28.300 Ton	8.250.000.000	28.300 Ton	8.250.000.000	28.300 Ton	8.250.000.000			DLH Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3	Kab. Tanjung Jabung Barat
											32.469.821.067	98.894.500.000		104.295.000.000		91.138.500.000		94.221.000.000		94.221.000.000						

Kuala Tungkal, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002



4. Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029.

Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu strategis daerah, urgensi pencapaian target-target lingkungan hidup, serta kontribusinya terhadap sasaran pembangunan berkelanjutan. Setiap sub kegiatan difokuskan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, menjawab permasalahan lingkungan yang mendesak, serta memperkuat fungsi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Adapun daftar sub kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas tersebut disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 12 Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
1.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
4.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan	
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk menjamin arah pembangunan yang terukur dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Indikator Kinerja Utama mencerminkan outcome utama dari kinerja perangkat daerah dan berperan sebagai indikator makro yang mampu menunjukkan dampak atas intervensi program dan kegiatan secara keseluruhan. IKU disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), serta diselaraskan dengan indikator pembangunan daerah dan prioritas nasional yang relevan dengan urusan lingkungan hidup.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama beserta sasaran strategis yang ingin dicapai, rumusan indikator, serta target tahunan selama periode perencanaan lima tahun mendatang.

Tabel 13 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator	Satuan	Formulasi	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	%	(Jumlah kegiatan/usaha PPLH ÷ Jumlah kegiatan/usaha diawasi) × 100%	75%	78%	82%	86%	90%	90%	Data pengawasan & verifikasi DLH
Persentase sampah yang tertangani (dibatasi, dan/atau diolah)	%	(Jumlah Sampah yang terkelola ÷ Total timbulan sampah) × 100%	35%	50%	55%	60%	65%	65%	Data pengelolaan sampah DLH

Indikator	Satuan	Formulasi	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Target Tahun 2027	Target Tahun 2028	Target Tahun 2029	Target Tahun 2030	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Persentase pengurangan timbunan Sampah dari sumber (3R: reduce, reuse, recycle)	%	(Volume sampah yang berhasil dikurangi dari sumber ÷ Total timbunan sampah) × 100%	5,19%	6,79%	9,31%	12,67%	15,00%	15,00%	Data pengelolaan sampah DLH
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	Skor Indeks (0-100) berdasarkan parameter kualitas sesuai Permen LHK atau metode KLHK	72,60	72,80	73,00	73,20	73,40	73,40	Data uji sampling
Persentase RTH yang dikelola dengan baik	%	(Luas RTH terkelola ÷ Luas RTH Total) × 100%	55%	58%	63%	67%	70%	70%	Data RTH Kabupaten

Kuala Tungkal, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja pelayanan dasar maupun non-dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKK menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup secara fungsional dan sistematis, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan. Penetapan IKK dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, dan kondisi riil pelayanan lingkungan hidup di daerah.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta rumusan indikator, satuan pengukuran, dan target tahunan dalam kurun waktu 2025 hingga 2029.

Tabel 14 Target Indikator Kinerja Kunci

No	Uraian/Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Lingkungan Hidup							
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tk. daerah provinsi	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	
3	Hasil pengukuran indeks kualitas air (IKA)	Skor Indeks	63,00 Indeks	63,20 Indeks	63,40 Indeks	63,60 Indeks	63,80 Indeks	
4	Hasil pengukuran indeks kualitas udara (IKU)	Skor Indeks	90,00 Indeks	90,20 Indeks	90,40 Indeks	90,60 Indeks	90,80 Indeks	
5	Hasil pengukuran indeks kualitas lahan (IKL)	Skor Indeks	57,00 Indeks	57,20 Indeks	57,40 Indeks	57,60 Indeks	57,80 Indeks	

No	Uraian/Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh pemerintah kota	%	90%	92%	94%	96%	98%	
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemkab, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota	Laporan	6 Laporan	5 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	
9	Rata-rata volume sampah yang terangkut dari rumah tangga ke TPS timbunan sampah yang ditangani	Ton	25.000 Ton	27.000 Ton	28.000 Ton	29.000 Ton	30000 Ton	
10	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Ton	2.200 Ton	1.400 Ton	1.500 Ton	1.600 Ton	1.700 Ton	
11	Persentase cakupan area pelayanan	%	34,50 %	34,70 %	34,90 %	35,10 %	35,30 %	
12	Cakupan pengelolaan sampah skala perkotaan / persentase jumlah sampah yang tertangani	%	40,31%	44%	43,93%	45%	45,81%	
13	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota	Ton	22.800 Ton	25.600 Ton	26.500 Ton	27.400 Ton	28.300 Ton	
14	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) kabupaten	Skor Indeks	72,60 Indeks	72,80 Indeks	73,00 Indeks	73,20 Indeks	73,40 Indeks	

Kuala Tungkal, September 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor lingkungan hidup selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi wujud komitmen Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan zaman.

Renstra ini tidak hanya menjabarkan visi dan misi pembangunan lingkungan hidup daerah, tetapi juga menyusun kerangka kerja strategis melalui tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta penahapan prioritas yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Seluruh perumusan telah memperhatikan potensi lokal, tantangan aktual, serta arahan kebijakan nasional dan global, termasuk isu perubahan iklim, pengelolaan sampah, pencemaran, kerusakan lingkungan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan Renstra ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan: pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh lapisan masyarakat. Perubahan menuju lingkungan yang lebih baik tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui sinergi yang berkesinambungan dan berorientasi pada hasil.

Dengan ditetapkannya dokumen ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan agenda strategis pembangunan lingkungan hidup dengan penuh integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Besar harapan kami, seluruh elemen yang terlibat dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan bersama dalam mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersih, sehat, lestari, dan berdaya saing.